

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan selalu memperoleh perhatian utama di Indonesia. Hal ini terjadi karena adanya kesadaran pemerintah bahwa kegagalan mengatasi persoalan kemiskinan dapat menyebabkan munculnya berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik di tengah-tengah masyarakat. Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2018 bahwa angka kemiskinan mencapai (9,82%).

Angka statistik ini mewakili suatu gejala kemiskinan yang dirasakan masyarakat kebanyakan mulai dari tumbuhnya sulitnya mencari pekerjaan, rendahnya daya beli masyarakat menghadapi harga-harga kebutuhan yang menjulang, hingga kejahatan pun dapat dilakukan seperti banyaknya seseorang melakukan pencurian yang sering terjadi, sesungguhnya erat kaitannya dengan masalah struktur ketimpangan sosial yang kurang mendukung. Institusi-institusi utama dalam negara, pemerintah dan pemilik modal, gagal menjalankan fungsi idealnya mensejahterakan kehidupan bermasyarakat, masyarakat semakin tidak berdaya dalam mengakses sumber perekonomian.

*“Kemiskinan merupakan kondisi yang serba terbatas dan terjadi bukan atas kehendak yang bersangkutan. Penduduk dikatakan miskin apabila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya yang menunjukkan lingkaran ketidak berdayaan”.*¹

Seiring berjalannya waktu, masyarakat terus berkembang kearah yang lebih maju seperti yang diharapkan. Masyarakat terus melakukan pembangunan

¹Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 237.

untuk memperbaiki kondisi kearah yang lebih baik, pembangunan (*development*) secara umum identik dengan proses perubahan yang direncanakan atau diperbaiki kondisi kearah yang lebih baik.

Pembangunan merupakan sebuah upaya untuk mencapai kemajuan bagi manusia. Pembangunan seringkali dikaitkan dengan pencapaian dan peningkatan kesejahteraan secara ekonomis. Kata kunci dari konsep pembangunan yaitu perubahan, pertumbuhan serta pemenuhan kebutuhan. Tujuan dari perubahan untuk meningkatkan pencapaian pada nilai budayanya yang menghasilkan kehidupan yang lebih baik, bahwa dalam pembangunan bukan terfokus pada satu titik ekonomi semata namun yang lebih penting untuk perbaikan kualitas kehidupan diri, sosial dan lingkungan.

Pembangunan secara fisik seperti membangun gedung, jalan, jembatan, pelabuhan atau pembangunan yang relative mudah dan kongkrit. artinya, pembangunan sarana fisik mudah dilihat dan dirasakan manfaatnya. Berbeda dengan pembangunan non fisik, misalnya pendidikan atau pelatihan memang tidak tampak dan tidak mudah dirasakan hasilnya. Namun pembangunan ini investasinya jangka panjang, hasilnya bisa nampak setelah beberapa waktu kedepan. Dalam proses pendidikan dari anak-anak yang baru dirasakan setelah tumbuh dewasa menjadi anak yang cerdas dan bermanfaat bagi lingkungan serta masyarakat sekitarnya.

Salah satu bentuk pembangunan yang berpusat pada manusia adalah pemberdayaan, pemberdayaan yang berasal dari kata “*Daya*” yang mempunyai

arti tenaga atau kekuatan. Pemberdayaan dengan upaya membangun sumber daya dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.

Pemberdayaan sebagai salah satu ujung tombak dari strategi untuk memerangi kemiskinan dalam pemberdayaan ini perlu adanya upaya yang amat pokok diantaranya terdapat peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi. seperti modal, teknologi dan informasi serta lapangan pekerjaan. Sejalan dengan itu, pemberdayaan juga sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marjinal dan terpinggirkan) untuk menyampaikan pendapat atau kebutuhan masyarakat mampu berpartisipasi, bernegosiasi dan mengelola kelembagaan masyarakat secara bertanggung jawab (*accountable*) demi perbaikan hidupnya.

Pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana baik fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti fasilitas sekolah dan pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan dan pemasaran di perdesaan, yang dimana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya kurang. Untuk itu perlu adanya program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku untuk semua, tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk

melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan, memajukan dan memandirikan masyarakat. Disamping itu pemberdayaan sebagai proses perubahan masyarakat sebagai fasilitator yang kompeten dan memiliki integritas yang tinggi terhadap perbaikan mutu hidup masyarakat yang akan difasilitasi, fasilitator yang terdiri dari aktivis CSR (*Corporate Social Responsibility*), LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) serta tokoh masyarakat dan warga setempat. Untuk itu pemberdayaan memerlukan fasilitator yang berperan sebagai (*agent of change*) yang berkewajiban untuk memotivasi, memfasilitasi dan melakukan advokasi demi mewujudkan perubahan yang diperlukan.

Jauh sebelum masyarakat sejahtera seperti sekarang ini kondisi masyarakat Desa Cibiru Wetan pada sebelumnya mengalami sulitnya mendapatkan pekerjaan, diakibatkan masyarakat yang kurang aktif, dan sulit untuk bersaing secara skill dimana latar belakang pendidikan masyarakat Desa Cibiru Wetan. Hal ini yang menyebabkan salah satu awal dasar dari ketidakberdayaan.

Ketidakberdayaan masyarakat yang sering terjadi karena perilaku birokrasi yang bersama-sama politisi dan pelaku bisnis yang menempatkan masyarakat sebagai sub-ordinat. Karena dengan pemberdayaan masyarakat harus mampu mengubah perilaku elit masyarakat (birokrasi, politisi dan pelaku bisnis) yang kehadirannya bukan sebagai penguasa melainkan lebih menempatkan diri sebagai fasilitator dan supervisor.

Dewasa ini, para pemimpin perusahaan menghadapi tugas yang menantang dalam menerapkan standar-standar etis terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab. Perusahaan berusaha meningkatkan kinerjanya untuk memperoleh keuntungan dan dapat bersaing dengan perusahaan lain, namun dalam usaha untuk mencapai suatu keuntungan yang optimal perusahaan dapat dikatakan berhasil jika memperhatikan lingkungan disekitar yaitu masyarakat setempat.

Dengan munculnya berbagai macam perusahaan sebagai bagian dari proses pembangunan nasional dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang telah membawa perubahan terhadap kehidupan masyarakat. Selama ini perusahaan dianggap sebagai lembaga yang dapat memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat seperti, memberikan kesempatan kerja, menyediakan barang yang dibutuhkan masyarakat untuk konsumsi, memberikan sumbangan dan lain-lainnya. Namun dibalik itu semua, dengan keberadaan suatu perusahaan banyak menimbulkan berbagai persoalan sosial dan lingkungan seperti polusi udara, keracunan, kebisingan, diskriminasi serta bentuk *negative externalities* lainnya, sehingga perlu adanya tanggung jawab sosial.

Perusahaan sebagai sebuah sistem dalam kehidupan keberlanjutan dan keseimbangan suatu perusahaan tidak dapat berdiri sendiri. eksistensi suatu perusahaan dengan masyarakat tidak dapat dipisahkan karena masyarakat sebagai lingkungan eksternalnya, harus ada hubungan timbal balik (*respirokal*) antara perusahaan dengan masyarakat, perusahaan dengan masyarakat merupakan pasangan hidup yang saling memberi dan saling membutuhkan.

Perusahaan selain mengejar keuntungan ekonomi dan untuk mensejahterakan dirinya, memerlukan alam untuk sumber daya olahannya dan *stakeholders* lain untuk mencapai sebuah tujuan. Dengan menggunakan pendekatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dari suatu perusahaan. Karena itu perusahaan tidak hanya mendapat keuntungan ekonomi saja tetapi secara sosial, dengan demikian keberlangsungan usaha tersebut dapat berlangsung dengan baik dan secara tidak langsung agar menghindari dari konflik yang merugikan.

CSR (*Corporate Social Responsibility*) merupakan komitmen perusahaan dalam dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan terhadap aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) perusahaan dengan demikian membutuhkan pemahaman yang baik dan mendalam mengenai kondisi masyarakat setempat dimana kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dalam perusahaan tersebut dapat diwujudkan.

Serta peran masyarakat dan *stakeholder* menjadi penting untuk dilibatkan dalam pelaksanaan dalam kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) tersebut. Kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) bagi masyarakat merupakan suatu proses yang bergerak dan bertalian dengan sumber-sumber yang ada pada masyarakat saat ini mulai dimanfaatkan secara maksimal oleh perusahaan.

Tanggung jawab sosial merupakan bagian dari CSR (*Corporate Social Responsibility*) sehingga diminta atau tidak mengenai peraturan ada atau tidaknya dari pelaksanaan CSR (*Corporate Social Responsibility*) pihak perusahaan akan tetap melakukan kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) kepada masyarakat lokal. Pada praktiknya program CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang dilakukan oleh perusahaan sebagai hubungan *respirokal* dari adanya sebuah perusahaan tersebut serta mengurangi terjadinya konflik antara masyarakat dengan perusahaan.

Pelaksanaan otonomi daerah juga memunculkan persoalan tersendiri yang harus dihadapi oleh perusahaan multinasional di daerah, seiring pula dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-haknya untuk turut serta mengatur penyelenggaraan Negara, masyarakat mulai ingin memperoleh manfaat keberadaan perusahaan yang beroperasi di daerahnya. Hal ini didukung oleh tuntutan dalam penerapan CSR (*Corporate Social Responsibility*) baik secara lokal melalui aksi masyarakat, secara nasional melalui legitimasi hukum, serta perindustrian di Indonesia.

PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk, atau dikenal dengan nama HM Sampoerna Tbk. (Sampoerna atau Perseroan) telah menjadi bagian penting dari industri tembakau Indonesia selama lebih dari seratus tahun sejak berdiri di tahun 1913 dengan produk legendaris Dji Sam Soe atau dikenal dengan “Raja Kretek”. Perseroan adalah anak perusahaan dari PT. Philip Morris Indonesia dan afiliasi dari Philip Morris International. Perusahaan rokok internasional terkemuka di ruang lingkup kegiatan perseroan meliputi antara lain manufaktur, perdagangan

dan distribusi rokok. HM Sampoerna memiliki lima pabrik yakni, dua pabrik Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang berlokasi di Pasuruan dan Karawang serta tiga pabrik Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang berlokasi di Surabaya serta masing-masing satu pabrik di Malang dan Purbalinggo dan mendistribusikan di setiap Kota.

Program CSR (*Corporate Social Responsibility*) PT. HM Sampoerna digabungkan dibawah payung “Sampoerna Untuk Indonesia” sampoerna berinvestasi pada kesejahteraan masyarakat luas sama pentingnya dengan berinvestasi pada masa depan pendekatan ini dikelompokkan menjadi empat kategori diantaranya, akses terhadap pendidikan, peluang ekonomi, pemberdayaan perempuan dan tanggap bencana dan kesiapsiagaan.

Diantaranya program tersebut dapat berjalan di daerah sekitar dengan memberikan kontribusi di setiap kegiatan hari-hari tertentu seperti memperingati tanggal 17 Agustus, menyumbangkan hewan qurban kepada masyarakat sekitar dalam memperingati hari raya Idul Adha, serta memberikan bantuan terhadap masyarakat yang membutuhkan dan kesiapsiagaan jika terjadi bencana. Melihat kondisi Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung dengan banyak pesawahan dan terdapat suatu organisasi yang dinamai dengan kelompok tani Rancage, yang bergerak dari tahun 2004-2012. Peran perusahaan dalam memberdayakan masyarakatnya melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Dengan memberikan bantuan modal yang dimanfaatkan masyarakat diantaranya dengan membeli hewan untuk ditenak dan kotoran hewan tersebut dapat diurai kembali, tabung air untuk kebutuhan masyarakat tidak hanya bantuan tersebut tetapi seperti pelatihan dari pihak PT. HM Sampoerna Tbk. Dengan memberikan alat pengurai pupuk kompos serta bak sampah organik dan non organik agar masyarakat bisa memilah dalam membuang sampah. Serta ada sebuah wadah untuk memberdayakan perempuan dengan diberikan bibit dari PT. HM Sampoerna disalurkan melalui Desa dan dibagikan kesetiap RW, yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan menghijaukan daerah Bandung.

Kegiatan tersebut hanya berlangsung selama delapan tahun setelah itu pesawahan sudah berpindah tangan untuk pembangunan lainnya. Pemberdayaan masyarakat tidak berhenti sampai disitu tetapi pemberdayaan akan terus berlanjut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan dalam kelompok tani tersebut yang masih aktif adalah kaum wanita dengan memanfaatkan sedikit lahan untuk bibit tanaman sayuran diantaranya terdapat salada, cabe, terong, kangkung, pokcoi, dan lain-lain oleh kelompok wanita tani (KWT) Rancage pada saat panen tiba hasilnya disimpan dan dikumpulkan untuk kepentingan bersama seperti bertamasya, ziarah, ataupun dibelikan baju seragam ataupun kebutuhan lainnya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai pemberdayaan masyarakat yang penulis tuangkan dalam judul: **Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. HM Sampoerna Tbk.**

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah suatu tahap permulaan dan penguasaan masalah dimana suatu objek tertentu dalam situasi tertentu dapat dikenali sebagai suatu masalah yang tujuannya agar mendapat sejumlah masalah yang berhubungan dengan penelitian.²

Dari uraian latar belakang diatas, peneliti melihat adanya beberapa permasalahan yang muncul dalam rencana penelitian ini, diantaranya: *pertama*, suatu perusahaan dan masyarakat saling membutuhkan, dimana masyarakat membutuhkan pekerjaan untuk meningkatkan perekonomian. *Kedua*, dampak dari PT. HM Sampoerna Tbk. terhadap masyarakat Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. *Ketiga*, sejauh mana proses pemberdayaan yang dilakukan PT. HM Sampoerna Tbk. dalam memberdayakan masyarakat Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dapat disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*) di Desa Cibiru, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung ?

² Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 18-19.

2. Bagaimana program CSR (*Corporate Social Responsibility*) terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung ?
3. Apa saja faktor pendorong dan penghambat dalam pemberdayaan masyarakat melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*) di Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung ?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan masalah dapat disusun sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*) di Desa Cibiru, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat dalam pemberdayaan masyarakat melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung.

1.5. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Akademis (Teoritis)

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan kemajuan ilmu sosial khususnya untuk ilmu sosiologi

pembangunan. Disamping itu penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai titik tolak untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam terutama dalam pemberdayaan masyarakat melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR).

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadikan masukan bagi lembaga-lembaga atau instansi pemerintah yang terkait. Dan diharapkan penelitian ini memiliki sumbangan positif bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat setempat dalam persoalan pemberdayaan masyarakat melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR), agar mencapai tujuan bersama dengan langkah-langkah yang baik.

1.6. Kerangka Pemikiran

Pemberdayaan atau *empowerment* yang berasal dari kata dasar *power* yang berarti kemampuan berbuat, mencapai, melakukan, dan memungkinkan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata pemberdayaan diterjemahkan sebagai upaya pendayagunaan, pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan hasil yang memuaskan. Menurut Swift dan Levin pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah untuk:

1. Memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan,

2. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.³

Dari defnisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud pemberdayaan adalah sebuah gerakan penguatan sosial agar masyarakat yang tadinya lemah, baik dalam bidang sosial, ekonomi, serta politik, lalu diberdayakan sehingga membangkitkan kesadaran masyarakat tersebut dan meningkatkan potensi yang mereka miliki dan guna membangun serta menentukan tindakan berdasarkan keinginan mereka secara mandiri melalui strategi dan pendekatan tertentu yang dapat menjamin keberhasilan hakiki dalam bentuk kemandirian.

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses partisipatif yang memberi kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji tantangan utama pembangunan mereka dan mengajukan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pada tingkat penentu kebijakan akan meningkatkan efektivitas dan efesiensi penggunaan sumber daya pembangunan yang semakin terbatas. Hal ini akan meningkatkan kesesuaian program pembangunan dengan kenyataan setempat dan memperkuat keberlanjutan program karena masyarakat mempunyai rasa memiliki tanggung jawab.

Dalam hal ini pemerintah harus mencari jalan keluar untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan berkreaitif dengan tujuan untuk mengurangi angka kemiskinan, dengan membuka lapangan pekerjaan yang luas serta banyaknya

³ Aprillia Theresia dkk, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung: Aflabeta Bandung, 2015), h. 114.

perusahaan yang berdiri. Mengenai perusahaan, bahwa perusahaan tidak dapat berdiri sendiri pasti membutuhkan masyarakat yang ikut serta berpartisipasi dalam keberlanjutan, dengan hal ini perusahaan memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat karena dalam setiap didirikan perusahaan pasti akan berdampak pada masyarakat maupun itu hal positif ataupun negatif.

Dengan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang merupakan sebuah kewajiban bagi pelaku bisnis untuk mensinergikan kegiatan bisnisnya dengan tujuan dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Menurut *World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) *Corporate Social Responsibility* merupakan komitmen berkelanjutan dari perusahaan untuk menjadi etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi disamping pengembangan kualitas hidup dari tenaga kerja maupun masyarakat lokal dan lingkungan secara luas.⁴

Menurut Schermerhorn *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai suatu kepedulian organisasi bisnis untuk bertindak dengan cara-cara mereka sendiri, dalam melayani kepentingan organisasi dan kepentingan publik eksternal. CSR yang juga dikenal sebagai tanggung jawab sosial, perusahaan merupakan sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis dan interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan.⁵ *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat dilakukan dalam berbagai situasi dengan mempertimbangkan hasil terbaik atau yang paling sedikit merugikan *stakeholder* dalam sebuah organisasi

⁴ Bambang Rudito dan Melia Famiola, *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*, (Bandung: Rekayasa Sains, 2007), h. 23.

⁵ *Ibid*, h. 25.

dapat memutuskan tindakan atau perilaku yang etis dalam situasi tertentu dengan prinsip-prinsip moral.

Berdasarkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) saat ini membawa kemunculan konsep teori Triple Bottom Line yang dikemukakan oleh John Elkington melalui bukunya "*canibals with forks: the triple bottom line in 21st century business*" diantaranya,

1. *Profit* yaitu, perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk terus beroperasi sampai berkembang.
2. *People*, perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Contohnya dengan memberikan bantuan beasiswa bagi pelajar yang bertempat tinggal sekita perusahaan, mendirikan sarana kesehatan, dan lain-lain.
3. *Planet*, perusahaan memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup yang berkelanjutan serta keragaman hayati, prinsip ini berupa penghijauan lingkungan hidup, penyediaan sarana air bersih dan lain-lain.⁶

Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial, masyarakat yang sebelumnya tidak berdaya menjadi berdaya dengan adanya program tersebut dari PT. HM Sampoerna Tbk. menjadi terbantu dalam keberlangsungan hidup masyarakat. program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang sudah terselenggarakan diantaranya di Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

⁶ John Elkington, *canibals with forks: the triple bottom line in 21st century business*, (Gabriola: New Society Publisher, 1997), h.68.

Program tersebut dapat berjalan di daerah sekitar dengan memberikan kontribusi di setiap kegiatan hari-hari tertentu seperti 17 Agustus, menyumbangkan hewan qurban kepada masyarakat sekitar dalam memperingati hari raya Idul Adha, kesiapsiagaan jika terjadi bencana dan memberikan membantu kepada masyarakat membutuhkan. Melihat kondisi penelitian disekitar perusahaan dengan masyarakat yang membutuhkan bantuan, sehingga tokoh masyarakat turut berpartisipasi untuk membuat proposal kepada perusahaan.

Peran perusahaan dalam memberdayakan masyarakatnya melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Pihak perusahaan mengadakan sosialisasi dengan melihat situasi dan kondisi di Desa Cibiru Wetan. kontribusi perusahaan diantaranya dengan memberikan bantuan dana sebesar Rp. 50.000.000,00 yang dimanfaatkan untuk masyarakat terutama dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Cibiru Wetan. diantaranya dengan membeli hewan untuk ditenak dan kotoran hewan tersebut dapat diurai kembali, tabung air untuk kebutuhan masyarakat, serta tidak hanya bantuan tersebut tetapi seperti pelatihan dari pihak PT. HM Sampoerna Tbk. Dengan memberikan alat pengurai pupuk kompos serta bak sampah organik dan non organik agar masyarakat bisa memilah dalam membuang sampah. Serta ada sebuah wadah untuk memberdayakan perempuan dengan diberikan bibit dari PT. HM Sampoerna Tbk. disalurkan melalui Desa dan dibagikan kesetiap Kelompok Tani, yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan menghijaukan Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Kota Bandung.

Kegiatan tersebut hanya berlangsung selama delapan tahun setelah itu pesawahan sudah berpindah tangan untuk pembangunan lainnya. Pemberdayaan masyarakat tidak berhenti sampai disitu tetapi pemberdayaan akan terus berlanjut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan dalam kelompok tani tersebut yang masih aktif adalah kaum wanita dengan memanfaatkan sedikit lahan untuk bibit tanaman sayuran diantaranya terdapat salada, cabe, terong, kangkung, pokcoi, dan lain-lain dan dibantu oleh kelompok wanita tani (KWT) Rancage pada saat panen tiba hasilnya disimpan dan dikumpulkan untuk kepentingan bersama seperti bertamasya, ziarah, ataupun dibelikan baju seragam dan kebutuhan lainnya.

Jika dilihat dalam konsep *triple bottom line* dari John Elkington tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar *profit* belaka tetapi juga menunjukkan kepedulian besar bagi lingkungan dan masyarakat sekitar tempat perusahaan bersangkutan beroperasi. Dengan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) ini tidak hanya merupakan investasi jangka panjang yang berguna untuk meminimalisasi risiko sosial, juga berfungsi sebagai sarana meningkatkan citra perusahaan dimata publik serta dapat memberdayakan masyarakat sekitar melalui program tersebut masyarakat dapat terbantu dan menjadi lebih mandiri serta lebih baik. Pemberdayaan masyarakat bukan hanya berupa *charity* tetapi terlihat dari program yang dijalankan oleh masyarakat dan masyarakat semakin berdaya selain itu masyarakat juga dapat merasakan hasilnya.

Dengan demikian jika dilihat sudut pandang sosiologi salah satu teori yang muncul dalam menjawab bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui program

Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap suatu institusi atau lembaga dalam masyarakat adalah menggunakan teori struktural fungsional dari Talcott Parsons.

Teori struktural fungsional Talcott Parsons diawali dengan empat skema penting mengenai fungsi untuk semua sistem tindakan, skema tersebut disebut dengan skema A-G-I-L (*adaptation-goal attainment-integration-latency*). Fungsi atau function merupakan kumpulan kegiatan yang ditujukan kearah pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem.⁷ Tekanan dalam analisis struktural fungsional Parsons adalah mekanisme yang meningkatkan stabilitas dan keteraturan dalam sistem sosial (*social order*). Talcott parsons mengembangkan teori AGIL ini dalam bukunya yang berjudul *The Social System*.⁸

Menurut Talcott Parsons ada empat fungsi penting yang dibutuhkan bagi semua sistem sosial, empat fungsi tersebut wajib dimiliki oleh semua sistem agar tetap bertahan. Keempat fungsi tersebut antara lain: *Adaptation* (A) penyesuaian diri, *Goal Attainment* (G) pencapaian tujuan, *Integration* (I) mengatur dan menjaga, dan *Latency* (L) memelihara atau memperbaiki pola-pola individu. Penjelasan dari keempat fungsi tersebut sebagai berikut:

1. *Adaptation* yaitu sistem harus dapat menyesuaikan diri dengan cara menanggulangi situasi eksternal yang gawat, dan sistem harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan juga dapat menyesuaikan lingkungan untuk kebutuhannya.

⁷ George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 117.

⁸ Ambo Upe, *Tradisi Aliran Dalam Sosiologi Dari Filosofi Positivistik ke Post Posivistik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 117.

2. *Goal Attainment* yaitu sistem harus bisa mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.
3. *Integration* yaitu sistem harus mampu mengatur antar-hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Selain itu sistem juga harus mengelola antarhubungan ketiga fungsi penting lainnya (A,G,L).
4. *Latency* yaitu sistem harus mampu berfungsi sebagai pemeliharaan pola, sebuah sistem harus memperlengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.⁹

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi Talcott Parsons menggunakan skema AGIL tersebut, diantaranya: Pertama, adaptasi (penyesuaian diri) dilaksanakan oleh organisme perilaku dengan melaksanakan fungsi adaptasi dengan cara menyesuaikan diri dan mengubah lingkungan eksternal (luar). Fungsi pencapaian tujuan difungsikan oleh sistem kepribadian dengan menetapkan tujuan sistem dan mengarahkan sumber daya untuk mencapainya. Fungsi integrasi dilakukan oleh sistem sosial yaitu dengan mengendalikan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Fungsi laten difungsikan oleh sistem kultural, sistem kultural melaksanakan fungsi pemeliharaan pola dengan menyediakan aktor seperangkat nilai dan norma yang mendorong aktor untuk bertindak.¹⁰

Talcott Parsons memperkenalkan sistem tindakan dengan skema AGIL-nya yang terkenal. Ia meyakini terdapat empat karakteristik terjadinya suatu tindakan, yakni *Adaptation*, *Goal Attainment*, *Integration*, dan *Latency*. Sistem

⁹Ritzer, *Loc.Cit.* h.117.

¹⁰Upe, *Op.Cit.*, h. 118.

tindakan hanya akan bertahan jika empat kriteria tersebut terpenuhi. Sistem mengandaikan antara bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain tersebut membentuk satu kesatuan. Dengan kata lain, bagian-bagian tersebut membentuk satu kesatuan (sistem) demi tercapainya tujuan tertentu.

Dengan demikian, berdasarkan teori struktural fungsional Talcott Parson dengan teori AGIL-nya, teori tersebut sesuai untuk digunakan dalam sebuah instansi perusahaan, seperti yang pertama dalam sistem adaptasi, aspek adaptasi disini disamakan dengan aspek biologis manusia sebagai suatu sistem maka ia akan beradaptasi dengan lingkungannya, sama halnya dengan instansi perusahaan dalam sistem tindakan berhubungan dengan fungsi adaptasi yaitu menyesuaikan diri dan mengubah lingkungan eksternal serta mengubah lingkungan sesuai dengan kebutuhan.

Yang dimana melihat bahwa masyarakat di Desa Cibiru Wetan khususnya pada kelompok tani rancage yang perekonomiannya masih rendah dan suatu instansi perusahaan tidak hanya mencari keuntungan tanpa melihat kondisi lingkungan di sekitar yang memberikan dampak kepada masyarakat Cibiru Wetan. Perusahaan berusaha untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada, maka dari itu pemerintah telah menetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) yang di dalamnya terdapat program CSR (*Corporate Social Responsibility*) atau tanggung jawab sosial kepada masyarakat agar masyarakat Desa Cibiru Wetan dan dapat berubah menjadi kearah yang lebih baik.

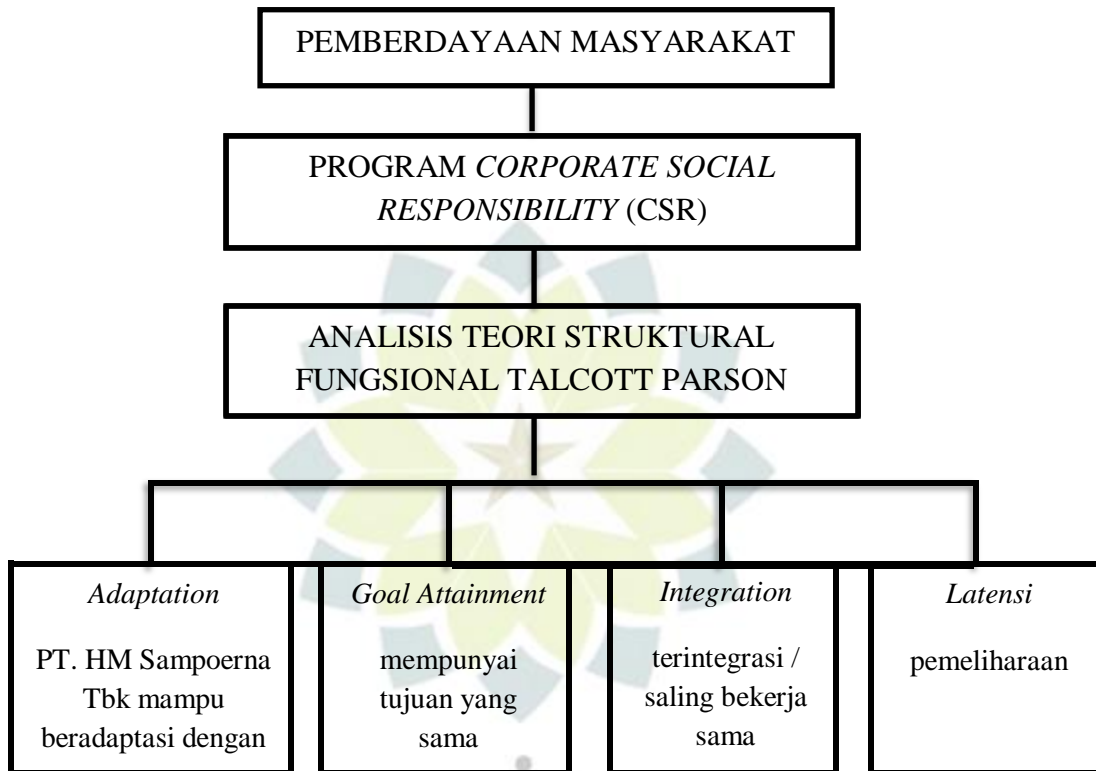
Tahap yang kedua adalah sistem kepribadian melaksanakan fungsi pencapaian tujuan (*goal attainment*) dengan menetapkan tujuan sistem dan memobilisasi sumber daya yang ada untuk mencapainya. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut tujuan harus dirumuskan dan seluruh sumber daya harus digerakkan, tujuan PT. HM Sampoerna Tbk. adalah menjadi perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial ditingkat lokal maupun global. Dengan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial, perusahaan dapat menggerakkan masyarakat agar lebih mandiri dan tidak bergantung dengan memberdayakan masyarakatnya serta kepedulian terhadap lingkungan agar hubungan antara perusahaan dengan masyarakat terjalin dengan baik demi tercapainya tujuan yang diharapkan.

Sistem sosial berhubungan dengan fungsi integrasi yaitu dengan mengendalikan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Dalam PT. HM Sampoerna Tbk. dengan masyarakat terutama pada kelompok tani di Desa Cibiru Wetan dan hal-hal pendukung lainnya harus saling terintegrasi satu sama lain. Sistem kultur (*Latency*) berhubungan dengan fungsi pemeliharaan pola dengan menyediakan aktor seperangkat norma dan nilai yang menjadi motivasi dalam bertindak. Seperti menyiapkan nilai-nilai dan norma-norma yang mendorong mereka dalam berbuat sesuatu. Ketika suatu keseimbangan sudah terbentuk maka apakah instansi tersebut bisa mempertahankan pola yang ada atau tidak.

Berdasarkan uraian di atas, adapun kerangka konseptual penelitian ini dapat di lihat sebagai berikut:

Gambar 1.1

Kerangka Konseptual





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG